

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR  
PERDESAAN (PIIP) DI DESA WIRU KECAMATAN BRINGIN  
KABUPATEN SEMARANG**

Oleh:

Fauzyah Rahmah, Ari Subowo

**Departemen Administrasi Publik**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kode Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRACT**

*The Village Infrastructure Development Program (PIIP) is a basic program of society empowerment, with purpose to increase the society welfare. Wiru Village, Bringin district, Semarang Regency is one of village that's received the support from PIIP. This research goal is to describe and analyze how the local government of Semarang Regency is implementing The Village Infrastructure Development Program (PIIP) at Wiru Village, by using the qualitative approached with descriptive type. The analysis techniques to acquire data through interview, observation, and support of documents. This research is using the theory by Merilee S. Grindle who said that the driving factors of implementation program consist of three main factors, there are the content of policy and the scope of policy, and the result of implementation can be seen by effects and changes that happened on society. The result has shown that implementation of The Villages Infrastructure Development Program (PIIP) Implementation at Wiru Villages, Bringin District, Semarang Regency received a positive responses from villagers, and a change after access repair of villagers access welfare has simplify and make the mobility of villagers easier. Even thought, the strengthening of villagers institutions that handle the PIIP is still unfulfilled yet because the limit time of program. So of that, the villagers need a soft skills training to make sure that even The Village Infrastructure Development Program (PIIP) has done, the villagers still can utilize that soft skills of PIIP effects.*

*Keywords: Implementation Program, Policy Content, Policy Context*

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pembangunan desa akan semakin menantang di masa depan dengan kondisi perekonomian yang semakin terbuka dan kehidupan berpolitik yang lebih demokratis. Tetapi, desa sampai saat ini masih belum beranjak dari profil lama, yakni terbelakang dan miskin. Meskipun banyak pihak mengakui bahwa desa mempunyai peranan yang besar bagi kota, namun tetap saja desa masih dipandang rendah dalam hal ekonomi ataupun yang lainnya (Direktorat Permukiman dan Perumahan, 2015).

Selain itu, sebagian besar penduduk Indonesia bertempat tinggal di daerah perdesaan dan berprofesi sebagai petani kecil (lahan terbatas dan sempit). Hal itu ditunjukkan sesuai Data Sensus Penduduk pada tahun 2010 penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di daerah perdesaan yaitu sebesar 50,21 persen atau sebanyak 119 juta jiwa dari seluruh penduduk Indonesia sebanyak 237 juta jiwa. Oleh karena itu, perlu adanya prioritas utama dalam pembangunan perdesaan dan segenap rencana strategi dan kebijakan pembangunan di Indonesia. Jika tidak, maka akan terjadi kesenjangan antara daerah perkotaan dan perdesaan akan semakin tinggi tertuama dalam hal perekonomian (Direktorat Permukiman dan Perumahan, 2015).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang RPJPN Tahun 2005-2025 upaya mewujudkan penanggulangan kemiskinan di perdesaan pemerintah

dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jendral Cipta Karya telah melaksanakan berbagai program, antara lain: Program Kompensasi Pengurangan Subsidi-Bahan Bakar Minyak di bidang Infrastruktur Perdesaan (PKPS-BBM IP) pada tahun 2005, *Rural Infrastructure Support* (RISP) tahun 2006, serta program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) sejak tahun 2007 sampai sekarang.

Program yang dinilai memberikan dampak yang baik bagi pembangunan infrastruktur perdesaan adalah Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan yang sampai saat ini masih terus dilakukan dan secara terus menerus dilakukan perbaikan-perbaikan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat desa sehingga dapat memecahkan masalah kemiskinan di desa.

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) sebagai program berbasis pemberdayaan masyarakat adalah program bagian dari PNPM Mandiri. Di mana kegiatan dalam program ini adalah masyarakat yang mengidentifikasi sendiri terhadap permasalahan ketersediaan dan akses masyarakat menuju infrastruktur dasar dengan menyusun oleh masyarakat sendiri tentang perencanaan pembangunan infrastruktur yang akan dilakukan.

(Kementerian Pekerjaan Umum, 2012).

Menurut Badan Pusat Statistik, pada bulan September 2015 Provinsi Jawa Tengah memiliki penduduk miskin sebanyak 13,32 persen atau 4.506,89 ribu jiwa dan sebagian besar penduduk miskin tersebut bertempat tinggal di wilayah perdesaan.

Kabupaten Semarang merupakan salah satu Kabupaten yang dekat dengan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah, dan masih memiliki penduduk miskin dengan kondisi infrastruktur yang cukup rendah dibandingkan Kota Semarang sebagai Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Ibu Kota Provinsi.

Kabupaten Semarang memiliki potensi perekonomian pada bidang industri, pertanian, dan pariwisata. Hal ini karena didukung oleh kondisi geografis Kabupten Semarang yang sebagian besar berbukit. Potensi unggulan tersebut juga terlihat dari kontribusi yang disumbangkan terhadap Produk Regional Domestik Bruto (PDRB) Kabupaten Semarang sampai pada tahun 2015.

Salah satu indikator yang menunjukkan taraf kesejahteraan masyarakat adalah besarnya jumlah Keluarga Sejahtera (Keluarga Pra KS). Di Kabupaten Semarang persentase jumlah Pra Keluarga Sejahtera yang terbesar berada di Kecamatan Suruh, Kecamatan Tengaran, Kecamatan Bringin, Kecamatan Susukan, dan Kecamatan Pringapus. Salah satu faktor penyebab tingginya jumlah Keluarga Pra KS pada daerah ini adalah faktor aksesibilitas pada sumberdaya ekonomi, yaitu umumnya daerah ini tidak berada pada jalur ekonomi

regional, dan beberapa bagian wilayah termasuk daerah dengan jangkauan aksesibilitas terbatas.

Kecamatan Bringin merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Semarang yang memiliki jumlah Keluarga Pra KS tertinggi dan mendapatkan bantuan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) dengan karakteristik kecamatan cukup banyak terdapat sektor Pertanian. Adapun sarana dan prasarana pembangunan untuk kemudahan akses masyarakat untuk mobilitas dan meningkatkan perekonomian masyarakat dengan melakukan pengerasan jalan, pengaspalan dan pembetonan jalan. Pembangunan saluran irigasi untuk mencegah banjir dan menjaga kenyamanan lingkungan perdesaan.

Pelaksanaan program PPIP salah satunya terdapat di Desa Wiru yang berada di Kecamatan Bringin sebagai desa yang memiliki kawasan Pertanian cukup luas. Sehubungan dengan ini, untuk mengetahui seberapa besar dampak yang diberikan program PPIP kepada masyarakat perdesaan di Desa Wiru kecamatan Bringin Kabupaten Semarang dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat perdesaan perlu dilakukan kajian lebih lanjut.

## **B. TUJUAN**

1. Mendeskripsikan Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di Desa Wiru Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang.
2. Mendeskripsikan hasil dari Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)

bagi peningkatan perekonomian masyarakat Desa Wiru Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang.

### C. TEORI

#### 1. Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Merilee S. Grindle, keberhasilan implementasi dipengaruhi dua variabel besar, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*).

Variabel isi kebijakan ini mencakup (1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* termuat dalam isi kebijakan; (2) jenis manfaat yang diterima oleh *target group*; (3) sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan; (4) apakah letak sebuah program sudah tepat; (5) apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci; (6) apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.

Variabel lingkungan kebijakan mencakup: (1) seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; (2) karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa; (3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Selain variabel konten dan variabel konteks, implementasi kebijakan oleh Merilee S. Grindle juga melihat hasil dari kebijakan berupa dampak yang dideskripsikan melalui *output*, *outcome*, dan *benefit*.

### D. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik purposive, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan orang yang mengetahui dan berpengalaman dalam permasalahan program pembangunan infrastruktur perdesaan. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka.

### PEMBAHASAN

#### A. HASIL PENELITIAN

##### 1. Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) di Desa Wiru Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang

###### (1) Kepentingan Masyarakat Miskin

Kepentingan masyarakat miskin yang diamati melalui empat fenomena yaitu (a) keberpihakan program PIIP kepada orang miskin (b) meningkatkan keeratan gotong royong masyarakat dalam program PIIP (c) meningkatkan keterlibatan dan peran aktif masyarakat dalam mendukung program PIIP, dan (d) penguatan kapasitas kelembagaan melalui program PIIP.

(a) Keberpihakan program PIIP kepada orang miskin

Pelaksanaan pendekatan keberpihakan kepada orang miskin dalam program PIIP ini terlihat pada saat pelaksanaannya melibatkan

secara langsung masyarakat miskin dan kaum perempuan, baik dalam proses sosialisasi pemerintah daerah kepada masyarakat hingga pelaksanaan pembangunan fisik berupa jalan beton di dusun kedunglaran.

(b) Meningkatkan keeratan gotong royong masyarakat dalam program PPIP

Di dalam meningkatkan keeratan gotong royong masyarakat Desa Wiru dalam program PPIP sudah berjalan dengan baik yang dapat dilihat dari saling bekerjasama warga masyarakat Dusun Kedunglaran membangun jalan beton dengan rasa antusias karena warga masyarakat menilai kebermanfaatan yang akan mereka terima mulai dari penyerapan tenaga kerja dan kemudahan akses mobilitas yang diterima. Bentuk gotong royong yang dilakukan Dusun Kedunglaran ini adalah memberikan swadaya sebagian tenaga kerja untuk ikut membangun jalan beton Dusun Kedunglaran. Tentu hal ini dapat menekan pengeluaran upah pekerja kasar untuk dapat menambah jarak pembangunan jalan beton semakin jauh.

(c) Meningkatkan keterlibatan dan peran aktif masyarakat dalam mendukung program PPIP

Di dalam meningkatkan keterlibatan dan peran aktif

masyarakat dalam mendukung program pembangunan infrastruktur perdesaan sudah cukup baik dengan kehadiran dalam musyawarah rencana pembangunan desa untuk menentukan jenis kegiatan pembangunan untuk pembangunan program PPIP. Keterlibatan dan peran aktif masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan desa ini didukung oleh masyarakat karena adanya keinginan perubahan dalam masalah akses untuk mobilitas masyarakat terutama masyarakat dusun kedunglaran. Di dalam musyawarah rencana pembangunan desa kaum miskin dan kaum perempuan terlibat aktif baik dalam kehadiran maupun pendapat-pendapat yang dikemukakan untuk menyampaikan aspirasi yang hendak diwujudkan dalam pembangunan desa melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP).

(d) Penguatan kapasitas kelembagaan melalui program PPIP.

Penguatan kapasitas kelembagaan melalui program pembangunan infrastruktur perdesaan yang dalam hal ini adalah organisasi masyarakat setempat (OMS) belum dicapai secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh tidak diberikannya pelatihan kepada para anggota organisasi untuk

keberlangsungan organisasi tingkat bawah dalam menjalankan program pembangunan infrastruktur perdesaan. Keberlangsungan organisasi masyarakat ini didampingi oleh Tim Pelaksana Kabupaten (TPK) dalam hal pelaporan dan pencairan dana. Artinya organisasi masyarakat ini belum berjalan secara mandiri dalam menjalankan program pembangunan infrastruktur perdesaan.

## **(2) Tipe Manfaat**

Manfaat yang diberikan program pembangunan infrastruktur perdesaan di Desa Wiru tidak hanya pada bidang ekonomi. Hal ini mendorong masyarakat untuk berinteraksi lebih banyak dengan masyarakat luas. Seperti pada bidang ekonomi dengan peralihan mata pencaharian masyarakat dari pertanian ke wirausaha merupakan implikasi dari adanya arus informasi yang masuk sehingga memunculkan inovasi dan semangat lebih untuk kesejahteraan pribadi maupun masyarakat.

## **(3) Derajat perubahan yang ingin dicapai**

Derajat perubahan yang dikehendaki program PPIP untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan mampu menyerap tenaga kerja dan dengan kemudahan akses tersebut dapat membuka lapangan pekerjaan lainnya sehingga menarik antusiasme masyarakat, serta dampak

program PPIP yang sudah mulai terlihat dengan semakin meningkatnya harga jual hasil pertanian masyarakat Desa Wiru, masyarakat memanfaatkan kemudahan akses untuk berwirausaha dengan semakin mudahnya menjangkau pusat perekonomian.

Derajat perubahan dari program PPIP Desa Wiru adalah meningkatnya penghasilan masyarakat perdesaan dari hasil jual panen sehingga kesejahteraan secara ekonomi masyarakat pun meningkat. Hal ini berkaitan dengan kepatuhan dan daya tanggap masyarakat terhadap program PPIP yang di dalam pelaksanaannya masyarakat perdesaan merupakan aktor utama untuk pelaksana sekaligus pemanfaat pembangunan jalan beton di Desa Wiru.

## **(4) Letak Pengambil Keputusan**

Aktor kebijakan PPIP terbagi kedalam dua bagian. Pertama, *top down* yang melibatkan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum sebagai Pemerintah yang bertanggung jawab atas program PPIP. Kedua, *bottom up* yang meliputi pemilihan kegiatan hingga pelaksanaan kegiatan dalam program PPIP. koordinasi antara pemerintah dengan masyarakat sebagai pelaksana dilakukan melalui dua cara, yaitu secara rutin per *tri wulan*, dan kondisional terutama pada saat pelaksanaan pembangunan

koordinasi sekaligus pengawasan dirutinkan menjadi setiap pekan. Di dalam teori Merilee S. Grindle variabel konten letak pengambilan keputusan ini berkaitan dengan variabel konteks kekuasaan kepentingan. Pengambilan keputusan program PPIP tercetus dalam kebijakan pusat yaitu secara nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan, namun dalam pelaksanaannya agar tercipta *sense of belonging* masyarakat terhadap pembangunan yang dilakukan, maka program PPIP dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif dengan penerima, pelaksana, dan pemanfaat program adalah masyarakat perdesaan.

#### **(5) Pelaksana Program**

Program PPIP memiliki kapasitas pada bidangnya secara aktif, berkualitas, berkeahlian dan berdedikasi cukup tinggi terhadap pelaksanaan tugas dan telah mendukung keberhasilan implementasi program PPIP Desa Wiru Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang. Pelaksana program PPIP yang tergabung dalam tim pelaksana kabupaten dan fasilitator masyarakat untuk menjadi pelaksana di setiap desa dan kecamatan di Kabupaten Semarang dibagi sesuai dengan kebutuhan desa yang mendapatkan program PPIP. Fasilitator Masyarakat (FM) yang mendampingi pada saat perencanaan pembangunan memiliki bidang keahlian pada bidang teknik dan ekonomi. Hal ini untuk merencanakan Rancangan

Anggaran dan Biaya pelaksanaan pembangunan jalan beton serta komposisi jalan beton tersebut oleh fasilitator di bidang teknik. Sedangkan tim pelaksana kabupaten yang menjadi petugas lapangan atau satker yang mendampingi pelaksanaan pembangunan jalan secara teknis mempunyai bidang keahlian yang mumpuni di bidang pembangunan jalan beton seperti teknik sipil, teknik arsitektur, dan teknik elektro. Tim pelaksana kabupaten ini merupakan gabungan sumberdaya daya manusia dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang, dan tenaga konsultan profesional.

#### **(6) Sumberdaya yang dilibatkan**

Aspek-aspek sumberdaya yang dilibatkan dalam program PPIP pada sumberdaya manusia baik kualitas maupun kuantitas telah memenuhi kebutuhan masyarakat, berikut dengan kesesuaian dana telah sesuai karena adanya penyesuaian di dalam Rancangan Anggaran dan Biaya yang sudah diperhitungkan termasuk untuk biaya pemeliharaan yang disisihkan sebesar Rp. 5.000.000,00 dari jumlah dana PPIP dengan tambahan masyarakat melakukan swadaya.

Besaran dana program PPIP yang telah ditetapkan pusat sebesar Rp. 250.000.000,00 diserahkan kepada desa untuk membangun fasilitas fisik berdasarkan kebutuhan desa dengan di fasilitasi tim pelaksana kabupaten untuk mendampingi beserta

fasilitator masyarakat yang sudah memahami program PPIP ditujukan serta dengan bidang keahlian secara teknis untuk pembangunan jalan beton. Anggaran yang diberikan ditransfer kepada OMS yang dibentuk dengan cara berangsur-angsur dengan tujuan melihat *progress* dan partisipasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam program PPIP. Penggunaan dana yang telah dianggarkan, OMS juga perlu mempertimbangkan biaya yang akan dikeluarkan untuk pembangunan yang dibutuhkan, maka masyarakat Desa Wiru mengadakan swadaya berupa tenaga dan dana untuk memaksimalkan pembangunan jalan yang panjang dengan anggaran yang telah ditetapkan.

#### **(7) Kekuasaan Kepentingan**

Bentuk strategi pemerintah dalam program pembangunan infrastruktur perdesaan adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebagai bentuk pengenalan dan memberikan pemahaman mengenai tahapan-tahapan program yang direncanakan dan dilaksanakan langsung oleh masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat sejak saat sosialisasi, musyawarah desa I sampai musyawarah desa III disikapi dengan antusias dan aktif termasuk kehadiran kaum miskin dan kaum perempuan sebagai sasaran utama dari program pembangunan infrastruktur perdesaan.

#### **(8) Karakteristik Lembaga**

Karakteristik lembaga yang menjadi pelaksana program pembangunan infrastruktur dapat dilihat dari empat fenomena penelitian yaitu (1) konflik yang pernah terjadi selama program dijalankan (2) intensitas konflik yang terjadi (3) mengenai strategi penyelesaian konflik (4) lembaga yang dilibatkan dalam penyelesaian konflik.

Konflik kepentingan antar dusun dengan intensitas terjadinya konflik hanya sekali terjadi pada saat musyawarah penentuan jenis kegiatan dan lokasi prioritas pembangunan untuk akses jalan dan dapat diselesaikan dengan musyawarah antara masyarakat, Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selain itu, konflik terjadi pada saat pembangunan jalan beton yang dilaksanakan di Dusun Kedunglaran berjalan mundur dari jadwal target awal perencanaan. Hal ini terjadi karena adanya pergantian musim dan sumber air yang cukup jauh dijangkau sehingga sulitnya mendapatkan sumber air untuk pembangunan jalan sehingga penyelesaian pembangunan jalan menjadi mundur dari target.

#### **(9) Kepatuhan dan daya tanggap**

Kepatuhan dan daya tanggap masyarakat Desa Wiru Kecamatan Bringin terhadap program PPIP sangat antusias, hal ini dapat dilihat dari jumlah kehadiran pada saat musyawarah rencana pembangunan desa yang diikuti oleh berbagai lapisan



masyarakat termasuk kaum miskin dan kaum perempuan sebagai target sasaran program PPIP. hal ini juga berarti memudahkan implementor (pemerintah kabupaten) untuk menjalankan program dan dukungan masyarakat memberikan dampak positif bagi evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP). Kepatuhan masyarakat Desa Wiru pun dapat dilihat dari keeratan gotong royong yang diperlihatkan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur di dusun kedunglaran dengan swadaya tenaga dari masyarakat kedunglaran.

## **2. Hasil dari Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) bagi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa Wiru Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang**

### **(1) Dampak pada Masyarakat, Individu, Kelompok**

Dampak yang dikehendaki dari adanya program pembangunan infrastruktur perdesaan adalah peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat perdesaan. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dampak implementasi program pembangunan jalan beton dusun kedunglaran dapat dilihat berdasarkan *output*, *outcome*, dan *benefit*. *Output* dari implementasi pembangunan jalan beton adalah jalan beton sejauh 600meter di dusun kedunglaran desa Wiru. *Outcome*

dari pembangunan jalan beton adalah peningkatan perekonomian masyarakat dusun kedunglaran, yang dapat dilihat dari meningkatnya harga penjualan hasil panen masyarakat peningkatan arus informasi yang diperoleh dari kemudahan akses, yang dapat dilihat dari adanya perputaran ekonomi dari hasil penjualan masyarakat diluar desa Wiru dengan masyarakat kedunglaran desa Wiru. Selain itu, *benefit* dari pembangunan jalan beton adalah kegiatan sehari-hari masyarakat dusun kedunglaran lebih efisien dari segi waktu karena dapat menempuh perjalanan lebih cepat dibandingkan dengan sebelum adanya pembangunan jalan tersebut. Selain itu, benefit dari pembangunan jalan beton juga dapat dilihat dalam bidang kesehatan, seperti akses pelayanan kesehatan lebih memadai yaitu dengan fasilitas mobil ambulan yang dapat menjangkau rumah masyarakat dusun kedunglaran dibandingkan dengan sebelum pembangunan jalan beton tidak ada kases mobil untuk masuk ke dusun kedunglaran.

### **(2) Perubahan dan Penerimaan Masyarakat terhadap program PPIP**

Perubahan yang dikehendaki dari program pembangunan infrastruktur perdesaan terhadap masyarakat adalah meningkatnya kemampuan kemandirian masyarakat perdesaan dalam penyelenggaraan infrastruktur perdesaan dan meningkatnya

jumlah penanganan desa tertinggal.

Perubahan dan penerimaan masyarakat di dalam Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) mengenai bagaimana peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan program PIIP yang dilaksanakan di Dusun Kedunglaran Desa Wiru.

Perubahan dan penerimaan masyarakat dalam program PIIP telah memenuhi target dari pemerintah, yaitu dengan antusiasme masyarakat karena masyarakat menerima banyak kemanfaatan yang diberikan program PIIP sehingga masyarakat saling bergotong royong membangun jalan karena program PIIP merupakan program berbasis pemberdayaan masyarakat, artinya program yang diserahkan kepada masyarakat sebagai *stakeholder* yang secara langsung terlibat sejak proses perencanaan sampai pada pemeliharaan jalan dan kemanfaatan pembangunan jalan beton adalah untuk masyarakat sendiri. Semua lapisan masyarakat dapat terlibat yaitu tokoh masyarakat, kaum perempuan, dan kaum miskin.

## **PENUTUP**

### **1. Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Desa Wiru Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang**

- (a) Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) di Desa

Wiru konsep pemberdayaan masyarakat sudah berjalan baik yang dibuktikan dengan angka partisipasi masyarakat yang tinggi dan hasil pembangunan jalan beton memberikan dampak dan manfaat yang sangat membantu masyarakat dalam kegiatan sehari-hari masyarakat desa Kedunglaran.

- (b) Pengelolaan program PIIP yang memiliki sifat jangka waktu terbatas oleh Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) yang didampingi oleh Tim Pelaksana Kabupaten (TPK) membuat organisasi OMS ini berjalan hanya sampai pada pelaksanaan jalan beton selesai tanpa adanya penguatan kelembagaan OMS. Sehingga proses pemeliharaan hasil PIIP adalah tanggung jawab bersama masyarakat setempat secara swadaya.

### **2. Hasil dari program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) bagi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa Wiru Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang**

- (a) Output dari Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) adalah pembangunan jalan beton sejauh 600 meter di Dusun Kedunglaran.
- (b) *Outcome* pembangunan jalan beton yaitu peningkatan

perekonomian masyarakat dusun kedunglaran, yang dapat dilihat dari meningkatnya harga penjualan hasil panen masyarakat peningkatan arus informasi yang diperoleh dari kemudahan akses, yang dapat dilihat dari adanya perputaran ekonomi dari hasil penjualan masyarakat diluar desa Wiru dengan masyarakat kedunglaran Desa Wiru.

- (c) *Benefit* pembangunan jalan beton yaitu efisiensi waktu yang digunakan masyarakat kedunglaran karena dapat menempuh perjalanan lebih cepat dibandingkan dengan sebelum adanya pembangunan jalan tersebut. Selain itu pada bidang kesehatan, seperti akses pelayanan kesehatan lebih memadai yaitu dengan fasilitas mobil ambulan yang dapat menjangkau rumah masyarakat dusun kedunglaran dibandingkan dengan sebelum pembangunan jalan beton tidak ada kases mobil untuk masuk ke dusun kedunglaran.

## REKOMENDASI

Rekomendasi yang dapat peneliti berikan bagi pihak-pihak terkait dengan program infrastruktur perdesaan antara lain:

- (1) Meningkatkan efektifitas fungsi organisasi masyarakat setempat (OMS) melalui pelatihan *sofskill* yang berkerjasama dengan Badan

Pemberdayaan Masyarakat yang bertujuan agar organisasi tidak hanya berfungsi untuk menerima dana saha, dan mengurangi ketergantungan lembaga OMS terhadap tim pelaksana kabupaten PPIP.

- (2) Memberikan fasilitas penerangan di sepanjang jalan beton yang dibangun untuk meningkatkan keamanan di waktu malam hari.
- (3) Memelihara jalan beton yang sudah dibangun secara kontinue agar dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang panjang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Chandra, Ade., dkk. (2005). *Manifesto Pembaharuan Desa*. Yogyakarta: APMD Press
- Dwipayana, AAGN Ari., dkk. (2003). *Membangun Good Governance di Desa*. Yogyakarta: Ire Press
- Hamdi, Muchlis Prof. (2014). *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Herry, Antono. (2015). *Kesiapan Desa Menghadapi Undang-Undang Desa: Tinjauan Desentralisasi Fiskal dan Peningkatan Potensi Desa*. Jurnal Ilmiah CIVIS, Nomor 1.
- Ibrahim, Amin. (2013). *Pokok-pokok Administrasi Pembangunan & Implementasinya*. Ed

- III. Bandung: PT Refika Aditama
- Keban, Yermias T. (2004). *Enam Dimensi Strategis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media
- Mardikanto, Totok., dan Poerwoko Soebiato. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, Lexy J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (ed XXVII). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. (2008). *Public Policy*. Jakarta : PT. Gramedia
- Siagian, Sondang P. (2003). *Administrasi Pembangunan: Konsep, Teori, dan Strateginya*. Ed III. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Subarsono, AG. (2012). *Analisis Kebijakan Publik*. (ed.VI). Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Suwitri, Sri. (2008). *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Winarno, Budi. (2005). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. (ed III). Yogyakarta: Media Pressindo.

## SUMBER LAIN

- <http://www.bps.go.id>
- <http://www.jateng.bps.go.id>
- <http://www.semarangkab.bps.go.id>
- <http://www.pu.go.id>
- <http://ciptakarya.pu.go.id>
- Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2015-2019
- Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2015
- RPJMD Kabupaten Semarang 2010-2015
- Dokumen Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kabupaten Semarang 2015
- Dzulkhijana, Atika. 2015. *Partisipasi Masyarakat Dalam Mensukseskan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di Kecamatan Banyubiru Kab. Semarang*. Skripsi. Universitas Diponegoro.